



Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bah Sidua Dua Kabupaten Serdang Bedagai

The Role of Village Government in Management Of Village Funds in Bah Sidua Dua Village, Serdang Bedagai District

Triana Saragih, Marlina Deliana, & Adam*

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area

Abstrak

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa yang bersumber dari APBN dialokasikan melalui APBD untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat. Namun, implementasinya di Desa Bah Sidua Dua belum sepenuhnya berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis didasarkan pada teori P. Siagian, yang mencakup empat indikator: stabilisator, inovator, pelopor, dan modernisator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa masih kurang optimal. Masyarakat Desa Bah Sidua Dua merasa bahwa pemerintah desa tidak memprioritaskan pembangunan infrastruktur, terutama jalan, yang menjadi kebutuhan utama mereka. Selain itu, hasil penelusuran mengungkapkan bahwa peran pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa belum berjalan secara efektif. Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran, sehingga pemerintah desa tidak dapat sepenuhnya merealisasikan program pembangunan yang direncanakan.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan; program; Kartu Indonesia Pintar.

Abstract

According to Government Regulation Number 60 of 2014, Village Funds sourced from the State Budget are allocated through the APBD to finance government, development, and community development. However, its implementation in Bah Sidua Dua Village has not fully run optimally. This study aims to analyze the role of village governments in the management of Village Funds and identify their inhibiting factors. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The analysis is based on P. Siagian's theory, which includes four indicators: stabilizer, innovator, pioneer, and modernisator. The results of the study show that the village government's efforts in managing the Village Fund are still not optimal. The people of Bah Sidua Dua Village feel that the village government does not prioritize infrastructure development, especially roads, which is their main need. In addition, the results of the search revealed that the role of the village government in the management of the Village Fund has not been carried out effectively. The main obstacle faced is budget limitations, so that the village government cannot fully realize the planned development program.

Keywords: Implementation of policies; programs; Smart Indonesia Card.

How to Cite: Saragih, T., Deliana, M., & Adam (2025). Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bah Sidua Dua Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 4(1): 39-45,

*E-mail: adam@staff.uma.ac.id

ISSN 2828-6537 (Online)

PENDAHULUAN

Desa Bah Sidua Dua merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai. Desa ini terdiri dari tujuh dusun, yaitu Dusun 1 Pagarluan, Dusun 2 Bah Sidua Dua Atas, Dusun 3 Bah Sidua Dua Bawah, Dusun 4 Sukaraja, Dusun 5 Pematang Bangun, Dusun 6 Panglong Jawa, dan Dusun 7 Panglong Batak (Astrina, 2023; Saragih, 2023). Secara geografis, Desa Bah Sidua Dua berada di dataran rendah dengan sebagian kecil wilayahnya berada pada ketinggian sekitar 79 meter di atas permukaan laut. Masyarakat desa ini mayoritas bekerja di sektor pertanian dengan menanam komoditas seperti ubi, jagung, dan kelapa sawit yang menjadi sumber utama perekonomian mereka (Sitopu & others, 2023; Tarigan & others, 2012). Selain itu, beberapa warga juga mengembangkan usaha peternakan, seperti sapi, kambing, ikan, dan ayam, serta menjalankan kegiatan wiraswasta, seperti agen sawit dan perdagangan makanan maupun sembako.

Pemerintah Indonesia telah menggulirkan program Dana Desa (DD) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendorong pembangunan pedesaan secara berkelanjutan (Dea et al., 2022; Jamaluddin et al., 2018). Desa Bah Sidua Dua mulai menerima alokasi dana desa sejak tahun 2021, dengan besaran anggaran mencapai Rp 712.767.000. Dana ini seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan ekonomi masyarakat, serta memperkuat kelembagaan desa. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana desa di Desa Bah Sidua Dua masih menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas implementasi program-program yang telah direncanakan (Berutu et al., 2019; Irhas Jaya, Humaizi, 2020; Purnawan et al., 2022).

Salah satu permasalahan utama yang muncul dalam pengelolaan dana desa adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) yang seharusnya menjadi forum partisipatif bagi seluruh elemen masyarakat sering kali hanya menjadi ajang formalitas (Bili & Ra'is, 2019; Hadawiya, 2021; Haluana & Mustafa, 2016), di mana keputusan lebih banyak didominasi oleh kepala desa dan perangkatnya, termasuk anggota keluarga atau kerabat dekat mereka. Akibatnya, aspirasi masyarakat kurang terakomodasi dalam kebijakan pembangunan desa.

Selain itu, dalam aspek pelaksanaan, masih ditemukan berbagai permasalahan terkait pembangunan infrastruktur. Misalnya, kondisi jalan desa yang belum merata, masih adanya jalan berlubang yang menghambat mobilitas masyarakat, serta minimnya fasilitas penerangan seperti lampu jalan (Haluana & Mustafa, 2016; Siregar & Kariono, 2015). Program pemberdayaan masyarakat juga belum berjalan optimal, dengan minimnya pelatihan keterampilan ekonomi, perdagangan, dan pertanian yang seharusnya dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka (Syardiansah et al., 2021; Tanjung & Munte, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam mengelola dana desa masih perlu ditingkatkan agar program yang telah dirancang dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Kendala lain dalam pengelolaan dana desa adalah lemahnya kontrol dan pengawasan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Minimnya transparansi dalam penggunaan dana desa menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Hakim & Pakam, 2014; Kholifah, 2020; Yudarta & Winaya, 2018). Sebagian besar warga menganggap bahwa alokasi dana desa belum berdampak secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan mereka, terutama dalam bidang finansial. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih baik dalam mengelola dana desa agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Isti, 2017; Sugiharti & Ramdan, 2019).

Dalam menganalisis peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Bah Sidua Dua, penelitian ini menggunakan teori administrasi publik yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian. Teori ini menekankan bahwa dalam menjalankan tugasnya, pemerintah desa harus berperan sebagai stabilisator, inovator, pelopor, dan modernisator. Peran sebagai stabilisator berarti pemerintah desa harus menjaga keseimbangan dalam sistem administrasi dan pembangunan desa agar berjalan sesuai dengan aturan dan kebutuhan masyarakat. Sebagai inovator, pemerintah desa dituntut untuk menghadirkan ide-ide baru dalam mengembangkan

potensi desa. Sebagai pelopor, mereka harus menjadi contoh dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu, sebagai modernisator, pemerintah desa harus mampu memanfaatkan teknologi dan sistem administrasi yang lebih efisien untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Bah Sidua Dua berdasarkan empat indikator teori Sondang P. Siagian serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan dana desa di desa tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa secara lebih transparan dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Bah Sidua Dua serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Metode ini bertujuan untuk menggali secara mendalam fenomena yang terjadi melalui pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan utama dalam penelitian ini adalah kepala desa dan perangkat desa, sementara informan tambahan berasal dari masyarakat yang terlibat atau merasakan dampak pengelolaan dana desa. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, di mana informan dipilih berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa.

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi peran pemerintah desa berdasarkan teori Sondang P. Siagian dengan empat indikator, yaitu stabilisator, inovator, pelopor, dan modernisator. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya transparansi, minimnya partisipasi masyarakat, serta kendala administratif dalam penyaluran dana dan pelaksanaan program. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, serta analisis dokumen seperti laporan keuangan desa dan dokumen perencanaan pembangunan desa. Analisis data dilakukan dengan pendekatan Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang diperoleh dianalisis secara induktif untuk menemukan pola yang dapat menjelaskan efektivitas peran pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kendala yang dihadapi pemerintah desa serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Bah Sidua Dua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa

1. Peran Pemerintah Desa sebagai Stabilisator

Sebagai stabilisator, pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam menjaga kestabilan administrasi dan pembangunan desa tanpa terpengaruh oleh hambatan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Kepala Desa Bah Sidua Dua, Bapak Ramidin Damanik, mengungkapkan bahwa dirinya telah berusaha menciptakan kestabilan ekonomi masyarakat melalui berbagai pembangunan yang bersumber dari dana desa. Beberapa program yang telah direalisasikan meliputi pembangunan posyandu untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pembangunan sekolah PAUD guna meningkatkan kualitas pendidikan sejak dini.

Dukungan terhadap transparansi dalam pengelolaan dana desa juga disampaikan oleh Bendahara Desa, Ibu Elpridawati Purba, S.Kom, yang menekankan pentingnya keterbukaan anggaran desa melalui papan informasi. Dengan adanya papan informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui secara jelas jumlah dana desa yang masuk dan bagaimana penggunaannya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Namun, beberapa warga seperti Manik Damanik dan Rini Sulastri Sitopu mengungkapkan bahwa

meskipun pemerintah desa telah melaksanakan pembangunan, kebutuhan mendasar seperti perbaikan akses jalan masih belum terealisasi, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari, terutama dalam sektor pertanian.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meskipun pemerintah desa telah mengupayakan kestabilan dalam pengelolaan dana desa, masih terdapat keluhan dari masyarakat terkait pemenuhan infrastruktur dasar seperti akses jalan. Oleh karena itu, peran pemerintah desa sebagai stabilisator perlu lebih ditingkatkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat secara lebih menyeluruh.

2. Peran Pemerintah Desa sebagai Inovator

Sebagai inovator, pemerintah desa diharapkan mampu menciptakan ide-ide baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bah Sidua Dua adalah pelatihan jahit menjahit yang bertujuan untuk menciptakan peluang usaha bagi masyarakat dan meningkatkan perekonomian keluarga. Kepala Desa Bah Sidua Dua, Bapak Ramidin Damanik, menyatakan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari program desa yang bertujuan agar masyarakat memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk membuka lapangan kerja sendiri. Selain itu, pemerintah desa juga merancang program pemasangan paving blok di Dusun III serta pembentukan Kampung KB sebagai langkah inovatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan berbagai pihak, termasuk Bendahara Desa dan kelompok tani, diketahui bahwa pemerintah desa secara aktif memantau dan memberikan perhatian terhadap jalannya pelatihan ini. Pemerintah desa juga berusaha untuk memastikan kelancaran kegiatan dengan mengunjungi lokasi pelatihan dan memberikan motivasi kepada peserta. Tokoh masyarakat seperti Manik Damanik mengapresiasi perhatian pemerintah desa dalam program ini, meskipun beberapa warga masih belum sepenuhnya memahami sejauh mana perhatian pemerintah desa dalam pelaksanaan program tersebut.

Secara keseluruhan, peran pemerintah desa sebagai inovator sudah mulai terlihat dengan adanya program-program yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Namun, efektivitas dari program-program ini masih perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan dampaknya yang lebih luas bagi masyarakat desa.

3. Peran Pemerintah Desa sebagai Pelopor

Sebagai pelopor, pemerintah desa harus menjadi contoh dalam pembangunan dengan menunjukkan kepemimpinan yang baik. Dalam hal ini, Kepala Desa Bah Sidua Dua berusaha untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan dengan memberikan kesempatan kepada warga desa untuk turut berpartisipasi dalam proyek-proyek pembangunan. Namun, karena keterbatasan tenaga ahli di desa, beberapa proyek pembangunan terpaksa melibatkan tenaga ahli dari luar desa. Meski demikian, kepala desa tetap turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa hasil pembangunan sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Bendahara Desa, kepala desa awalnya ingin menggunakan tenaga kerja dari masyarakat setempat, tetapi karena keterbatasan keterampilan, akhirnya tenaga ahli dari luar desa yang dilibatkan. Meskipun demikian, upaya sosialisasi dan ajakan gotong royong tetap dilakukan agar masyarakat turut berkontribusi dalam pembangunan. Beberapa tokoh masyarakat seperti Rini Sulastri Sitopu menilai bahwa kepala desa sudah cukup baik dalam memberikan motivasi dan contoh dalam pelaksanaan gotong royong, meskipun masih ada masyarakat yang merasa kurang memperhatikan keterlibatan pemerintah desa dalam pembangunan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah berusaha menjalankan perannya sebagai pelopor dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menunjukkan kepemimpinan yang baik. Namun, keterbatasan sumber daya lokal menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih inklusif.

4. Peran Pemerintah Desa sebagai Modernisator

Sebagai modernisator, pemerintah desa harus mampu mengembangkan desa ke arah yang lebih maju dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menciptakan sistem yang lebih efisien. Kepala Desa Bah Sidua Dua menyatakan bahwa dirinya telah berusaha untuk meningkatkan perekonomian desa dengan memanfaatkan potensi yang ada. Namun, beberapa

tokoh masyarakat seperti Manik Damanik dan Rini Sulastri Sitopu menilai bahwa upaya modernisasi desa masih belum optimal karena kebijakan yang diambil pemerintah desa masih kurang tepat sasaran. Infrastruktur dasar seperti jalan yang rusak dan kurangnya penerangan jalan menjadi kendala utama dalam mencapai kemajuan desa.

Beberapa warga desa juga berpendapat bahwa Desa Bah Sidua Dua belum dapat dikategorikan sebagai desa maju karena masih minimnya pengelolaan potensi sosial, ekonomi, dan ekologi. Meskipun pemerintah desa telah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, manajemen pembangunan yang belum efektif menjadi salah satu faktor penghambat kemajuan desa.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, peran kepala desa sebagai modernisator sudah terlihat melalui berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan perekonomian dan infrastruktur desa. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasi kebijakan yang membuat masyarakat merasa bahwa pembangunan desa belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam perencanaan pembangunan agar dapat benar-benar memberikan dampak positif bagi kemajuan desa.

Faktor Penghambat Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa

1. Minimnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Salah satu faktor utama yang menghambat peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Bah Sidua Dua adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan, termasuk kegiatan gotong royong yang menjadi bagian dari budaya dan identitas desa. Namun, kenyataannya, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini masih sangat rendah.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Bah Sidua Dua, Bapak Ramidin Damanik, diketahui bahwa meskipun pemerintah desa telah melakukan sosialisasi dan memberikan contoh nyata dalam kegiatan gotong royong, hanya segelintir warga yang bersedia terlibat secara aktif. Ia menyebutkan bahwa dalam setiap kegiatan gotong royong, hanya sekitar 3-4 orang yang berpartisipasi, sementara mayoritas masyarakat kurang antusias. Hal ini menjadi kendala serius bagi pemerintah desa dalam mempercepat pembangunan.

Senada dengan hal tersebut, Bendahara Desa, Ibu Elpridawati Purba, S.Kom, menyatakan bahwa rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa menghambat upaya pemerintah dalam memajukan desa. Ia menegaskan bahwa bagaimana pun pemerintah berusaha, tanpa keterlibatan aktif dari masyarakat, pembangunan tidak dapat berjalan secara maksimal. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Minaria Sipayung, salah satu anggota kelompok tani, yang juga mengakui bahwa masih banyak masyarakat yang belum antusias dalam bergotong royong. Demikian pula dengan Marlan Purba, anggota kelompok tani lainnya, yang mengakui bahwa dirinya sendiri kurang terlibat dalam kegiatan pembangunan desa.

Minimnya partisipasi masyarakat ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya pembangunan desa, kurangnya kepemimpinan yang mendorong keterlibatan aktif warga, serta kecenderungan masyarakat yang lebih fokus pada kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah desa perlu melakukan pendekatan yang lebih intensif, baik melalui sosialisasi yang lebih masif maupun dengan memberikan insentif bagi masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa.

2. Keterbatasan Anggaran Dana Desa

Selain rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran dana desa juga menjadi faktor penghambat utama dalam pengelolaan dan realisasi pembangunan desa. Meskipun pemerintah desa telah menyusun rencana pembangunan yang matang, ketersediaan dana yang terbatas sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Anggaran yang diterima desa harus dibagi untuk berbagai bidang, termasuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta operasional pemerintahan desa.

Dalam wawancara dengan Kepala Desa Bah Sidua Dua, Bapak Ramidin Damanik, ia menyatakan bahwa anggaran yang diterima desa tidak sepenuhnya dapat dialokasikan untuk pembangunan. Dana desa harus dibagi untuk berbagai kebutuhan lain, seperti bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan operasional desa. Hal ini menyebabkan banyak program pembangunan yang telah direncanakan tidak dapat direalisasikan sepenuhnya.

Bendahara Desa, Ibu Elpridawati Purba, S.Kom, juga menegaskan bahwa anggaran dana desa harus dialokasikan ke berbagai sektor, bukan hanya pembangunan. Meskipun pemerintah desa memahami pentingnya pembangunan infrastruktur, keterbatasan anggaran membuat mereka tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pembangunan fisik. Tokoh pemuda desa, Ibu Rini Sulastri Sitopu, juga menyatakan bahwa masyarakat seharusnya memahami bahwa dana desa bukan hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga harus mencakup sektor lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Hal ini juga diperkuat oleh pendapat tokoh masyarakat, Bapak Manik Damanik, yang menyatakan bahwa ia sebagai masyarakat awam memahami bahwa anggaran desa memang memiliki alokasi yang terbagi ke berbagai bidang. Oleh karena itu, masyarakat juga harus menyadari bahwa tidak semua anggaran bisa difokuskan pada pembangunan infrastruktur saja. Namun, meskipun ada pemahaman seperti ini, tetap saja keterbatasan anggaran menghambat realisasi berbagai program pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat.

Keterbatasan anggaran ini menunjukkan bahwa pemerintah desa perlu mencari solusi alternatif untuk menutupi kekurangan dana pembangunan, seperti menggali sumber pendanaan lain dari pemerintah pusat atau daerah, bekerja sama dengan sektor swasta, atau memanfaatkan potensi desa secara lebih maksimal untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Dengan cara ini, pembangunan dapat tetap berjalan meskipun anggaran dana desa terbatas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, peran pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bah Sidua Dua telah mencakup empat indikator utama, yaitu sebagai stabilisator, inovator, pelopor, dan modernisator. Sebagai stabilisator, pemerintah desa berupaya menjaga keseimbangan pembangunan dengan merealisasikan berbagai program, seperti pembangunan posyandu dan PAUD, meskipun masih terdapat kekurangan dalam penyediaan infrastruktur dasar seperti akses jalan. Sebagai inovator, pemerintah desa telah menciptakan program pelatihan jahit menjahit dan pembentukan Kampung KB untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun efektivitasnya masih perlu dievaluasi. Sebagai pelopor, pemerintah desa telah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, meskipun keterbatasan tenaga ahli menjadi tantangan tersendiri. Sementara itu, sebagai modernisator, upaya pemerintah desa dalam memanfaatkan potensi desa masih belum maksimal, terutama dalam pengelolaan infrastruktur dan ekonomi yang masih menghadapi berbagai kendala.

Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi dua faktor utama yang menghambat optimalisasi peran pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa, yaitu minimnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan anggaran. Partisipasi masyarakat yang rendah dalam kegiatan gotong royong dan pembangunan desa menghambat efektivitas program yang telah dirancang pemerintah desa. Di sisi lain, keterbatasan anggaran Dana Desa mengharuskan pemerintah desa membagi alokasi dana ke berbagai sektor, yang menyebabkan beberapa program pembangunan tidak dapat terealisasi sepenuhnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan keterlibatan masyarakat melalui sosialisasi dan insentif, serta eksplorasi sumber pendanaan alternatif agar pembangunan desa dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astrina, L. (2023). Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Jalan di Desa Pulau Gambar Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai. Universitas Medan Area.
- Berutu, B. R., Nasution, M. A., & Kadir, A. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v1i1.1>

- Bili, S. R., & Ra'is, D. U. (2019). Dampak Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 6(3), 38–45. <https://doi.org/10.33366/JISIP.V6I3.1457>
- Dea, S., Ginting, A., Suharyanto, A., & Batubara, B. M. (2022). Evaluasi Penyaluran Program Anggaran Dana Desa Di Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinam Kabupaten Dairi. *Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(1), 46–55. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i1.1183>
- Hadawiya, R. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
- Hakim, A., & Pakam. (2014). Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tandam Hulu Ii Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 2(1), 1–20. https://www.google.com/search?safe=strict&ei=_P-mXPnMJ63az7sP1ryRwA0&q=Anggraini%2C+R.+D.+%282013%29.+Transparansi%2C+Partisipasi%2C+dan+Akuntabilitas+Pengelolaan+Anggaran+Dana+BOS+Dalam+Program+RKAS+di+SDN+Pacarkeling+VIII+Surabaya.+Kebijakan+Dan+Manajem
- Haluana, K., & Mustafa, W. (2016). Peran Kecamatan dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 4(1), 11–22. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/299/891%0A>
- Irhas Jaya, Humaizi, N. A. (2020). Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Desa di Desa Jungke Management Analysis of Village Fund Management in Jungke. *PERSPEKTIF*, 9(2), 252–262.
- Isti, D. N. (2017). Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 13(1), 52–62.
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 6(1), 14–25. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1520>
- Kholifah, N. N. (2020). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa melalui Kinerja Pemerintah Desa Sebagai Mediasi (Studi Kasus pada Perangkat Desa di Kecamatan Sumber dan Kecamatan Remba. Skripsi). Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
- Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S. I. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang. *Perspektif*, 11(2). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5876>
- Saragih, D. R. (2023). Hubungan Kepuasan Kerja dengan Intensitas Turnover Karyawan CV. Sumber Harapan Tani di Kecamatan Serbajadi.
- Siregar, D. E., & Kariono. (2015). Evaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan jalan lingkungan di kelurahan dwikora kecamatan medan helvetia kota medan tahun 2012. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 3(1), 20–35.
- Sitopu, D. W., & others. (2023). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa Di Desa Kelapa Bajohom Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai. Universitas Medan Area.
- Sugiharti, D. K., & Ramdan, A. (2019). Mewujudkan Desa Bebas Korupsi Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Terpadu. *Pandecta: Research Law Journal*, 14(1), 57–72. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v14i1.16729>
- Syardiansah, S., Arlinta, A., Amilia, S., & Meutia, R. (2021). Pelatihan Pengembangan Tanaman Obat Keluarga Melalui Peran Serta Masyarakat Di Kampung Seuriget Kecamatan Langsa Barat. *Pelita Masyarakat*, 2(2), 72–82. <https://doi.org/10.31289/pelitamasyarakat.v2i1.3799>
- Tanjung, D. A., & Munte, S. (2020). Pelatihan Pembuatan Bata Ringan Kepada Home Industri Batu Bata Konvensional Guna Mendukung Program Pemerintah 1 Juta Rumah Bersubsidi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 578–582. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.116>
- Tarigan, U., & others. (2012). Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh).
- Yudhartha, P. D., & Winaya, I. K. (2018). Desa Membangun: Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1470>